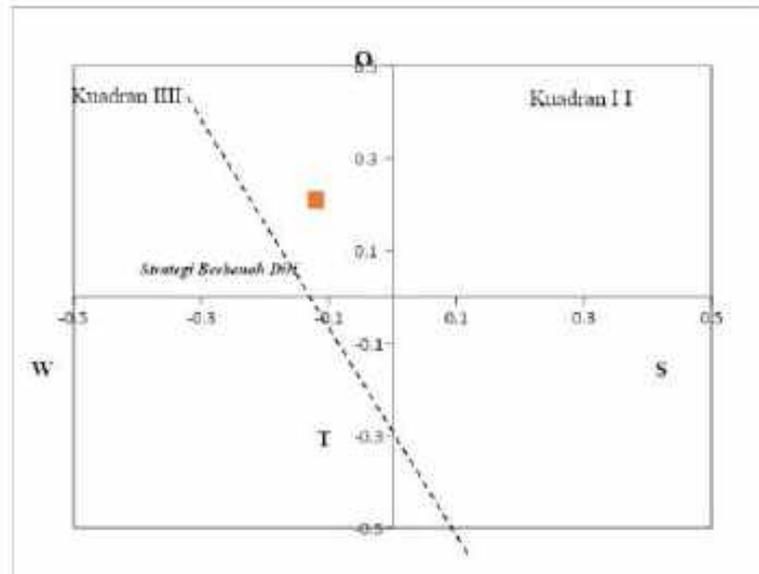




<p>EFAS</p> <p>Opportunity (Peluang) Produk perikanan Kabupaten Belitung diminati pasar ekspor dan lokal. Dukungan penuh dari pemerintah pusat dalam mengembangkan sektor perikanan di Kabupaten Belitung. Sudah mulai direalisasikan pembangunan perikanan terpadu (Kawasan ekonomi Khusus/KEK, pelabuhan perikanan) untuk mengembangkan sektor perikanan di Kabupaten Belitung. Terjalannya kerjasama lintas sektoral terhadap para investor dan stakeholder dalam pengembangan perikanan di Kabupaten Belitung.</p>	<p>Strategi Agresif (SO) Memaksimalkan pemanfaatan alokasi lahan dalam mengembangkan sektor perikanan seperti meningkatkan infrastruktur penunjang. Mengoptimalkan usaha kegiatan budidaya laut dan melakukan pembangunan untuk perikanan terpadu. Melakukan kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk merealisasikan pembangunan perikanan sehingga dapat memaksimalkan kegiatan perikanan dan dapat menjadi daya tarik para investor dan stakeholder, menjaga dan melestarikan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya perikanan sehingga dapat menjamin kualitas mutu produk perikanan dalam pemenuhan kebutuhan pasar dan sebagai sumber perekonomian daerah.</p>	<p>Strategi Berbenah Diri (WO) Mengoptimalkan fungsi fasilitas dan melakukan pembangunan tambahan fasilitas yang sudah optimal untuk menunjang operasional kegiatan penangkapan ikan (dermaga, SPBN, lampu tanda, penyedia es pendingin) dan meningkatkan nilai jual produk perikanan (cold storage dan tempat penjemuran) pada setiap sentra perikanan di Kabupaten Belitung sehingga dapat menjamin kualitas mutu produk di pangsa pasar. Mengoptimalkan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pihak stakeholder lainnya seperti pengajuan bantuan untuk pinjaman dari pihak perbankan, bantuan sarana dan prasarana, koperasi nelayan serta BBM bersubsidi sehingga dapat meminimalisir biaya operasional dan ketergantungan dengan pemodal. Melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap SDM (Nelayan dan Tenaga Ahli) terkait penggunaan teknologi penangkapan modern sehingga dapat melakukan pembaharuan terhadap keragaan unit kegiatan penangkapan ikan</p>
<p>Threats (Ancaman) Perubahan siklus oseanografis yang tidak menentu dan berlangsungnya musim pakeklik yang mengakibatkan fluktuasi hasil tangkapan dan pendapatan nelayan. Munculnya isu sosial dan lingkungan akibat aktivitas penambangan timah di perairan Kabupaten Belitung tepatnya di Kecamatan Sijuk, Masuknya nelayan luar yang beroperasi dengan kapasitas armada penangkapan yang lebih besar. Ketergantungan nelayan terhadap pemodal terkait dalam modal usaha perikanan yang mengakibatkan rendahnya harga jual hasil tangkapan</p>	<p>Strategi Diversifikasi (ST) Perlunya arah kebijakan yang jelas dan tegas dari pemerintah setempat terkait pemanfaatan ruang laut di Kabupaten Belitung khususnya kecamatan Sijuk sehingga dalam pemanfaatannya tidak saling tumpang tindih dan meminimalisir konflik baik ekonomi, lingkungan dan sosial yang berkepanjangan di kehidupan masyarakat. Mengoptimalkan peran pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan pihak swasta atau stakeholder sebagai lembaga penyedia pinjaman modal untuk nelayan sehingga dapat meminimalisir ketergantungan simpanpinjam dengan bos/touke yang mematok harga lebih tinggi. Melakukan patroli secara berkala dan pemberian sanksi kepada para pelaku nelayan luar yang beroperasi di wilayah tangkap Kabupaten Belitung dengan melibatkan kerjasama antara pemerintah setempat, pihak kepolisian dan pihak yang berkaitan sehingga dapat menjamin potensi perikanan yang ada.</p>	<p>Strategi Defensif (WT) Melakukan programperikanan seperti bazar ikan, gemar makan ikan, wisata kuliner dan pasar terbuka secara periodic sebagai "daya tarik/icon" dengan tujuan meningkatkan pendapatan pelaku usaha perikanan dan sebagai upaya dalam menghadapi penurunan hasil dan pendapatan nelayan pada musim pakeklik. Penegakan aturan dan hukum yang tegas terkait adanya aktivitas penambangan timah ilegal, adanya nelayan luar yang beroperasi di wilayah perairan penangkapan ikan di Kabupaten Belitung. Memanfaatkan peran dan dukungan dari pemerintah setempat dan pemerintah pusat untuk melakukan kerjasama dengan pihak investor terkait pembuatan produk olahan perikanan dalam skala pabrik sehingga pada musim pakeklik berlangsung nelayan masih memiliki pendapatan</p>

Berdasarkan hasil analisis matrik SWOT menunjukkan bahwa prioritas strategi yang tepat terhadap dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Belitung adalah strategi berbenah diri (strategi WO). Adapun matriks tersebut sebagai berikut:



Gambar 6 Analisis Kuadran SWOT perikanan Tangkap

Prioritas strategi peningkatan tingkat kesejahteraan nelayan di Kabupaten Belitung adalah:

- 1) Mengoptimalkan fungsi fasilitas dan melakukan pembangunan tambahan fasilitas yang sudah optimal untuk menunjang operasional kegiatan penangkapan ikan (dermaga, SPBN, lampu tanda, penyedia es pendingin) dan meningkatkan nilai jual produk perikanan (cold storage dan tempat penjemuran) pada setiap sentra perikanan di Kabupaten Belitung sehingga dapat menjamin kualitas mutu produk di pangsa pasar;
- 2) Mengoptimalkan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pihak stakeholder lainnya seperti pengajuan bantuan untuk pinjaman dari pihak perbankan, bantuan sarana dan prasarana, koperasi nelayan serta BBM bersubsidi sehingga dapat meminimalisir biaya operasional dan ketergantungan dengan pemodal.
- 3) Melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap SDM (Nelayan dan Tenaga Ahli) terkait penggunaan teknologi penangkapan modern sehingga dapat melakukan pembaharuan terhadap keragaan unit kegiatan penangkapan ikan.

b. Strategi Pengembangan Perikanan Budidaya Kabupaten Belitung tahun 2023

Tabel 23. SWOT Perikanan Budidaya Kabupaten Belitung

IFAS (Internal Factors Analysis Summary)

Faktor Internal					
No.	Kekuatan	Bobot	Relatif	Rating	Score
1.	Terdapat potensi perikanan budidaya di Kabupaten Belitung terdiri dari budaya air laut (ikan kerapu, rumput laut dan garam) dan budidaya air tawar (ikan nila, lele, patin, kepiting bakau dan udang vanname)	4	0,12	3	0,36



2.	Sudah terbentuknya POKDAKAN yang dibina langsung oleh pemerintah daerah Kabupaten Belitung	3	0,09	3	0,27
3.	Ketersediaan peruntukkan lahan untuk kegiatan perikanan budidaya masih dapat di optimalkan untuk mendukung pengembangan industri perikanan global	5	0,15	4	0,6
4.	Sebagian besar kegiatan usaha budidaya sudah miliki sendiri dan juga berkelompok yang dibina oleh pemerintah daerah Kabupaten Belitung	4	0,12	4	0,48
Total			0.48		1.71
Faktor Internal					
No	Kelemahan	Bobot	Relatif	Rating	Score
1.	Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya di Kabupaten Belitung	5	0,14	-3	-0,42
2.	Terbatasnya ketersediaan benih	4	0,12	-4	-0,48
3.	Minimnya permodalan pelaku usaha budidaya	4	0,12	-2	-0,24
4.	Masih terbatasnya pengetahuan SDM (pembudidaya dan tenaga ahli) terkait kegiatan budidaya seperti penggunaan teknologi, pembuatan pakan, pembenihan serta pemahaman kualitasair dan penyakit ikan	5	0,14	-2	-0,28
Total			0.52		-1.42
Total SW (X)			1.00		0.29

EFAS (Eksternal Factors Analysis Summary)

Faktor Eksternal					
No.	Peluang	Bobot	Relatif	Rating	Score
1.	Tinggi permintaan pasar lokal terhadap budidaya ikan air tawar maupun ekspor terhadap produk hasil budidaya seperti ikan kerapu, udang vanname dan kepiting bakau	5	0,14	3	0,42
2.	Prospek perikanan budidaya di Kabupaten Belitung sudah berkembang sehingga terbukanya kerjasama dengan pihak investor	4	0,11	3	0,33
3.	Sudah mulai teralisasi pembangunan perikanan terpadu (Kawasan Ekonomi Khusus/KEK, pelabuhan perikanan) untuk mengembangkan sektor perikanan di Kabupaten Belitung	4	0,09	3	0,27
4.	Dukungan penuh dari pemerintah pusat dalam mengembangkan sektor perikanan di Kabupaten Belitung	5	0,14	4	0,56
Total			0.48		1.58
No.	Ancaman	Bobot	Relatif	Rating	Score
1.	Sudah adanya isu sosial dan lingkungan akibat aktivitas penambangan timah di perairan Kabupaten Belitung tepatnya di Kecamatan Sijuk	4	0,11	-3	-0,33
2.	Tingginya harga pakan buatan (pelet) dan pakan alternative	5	0,14	-3	-0,42
3.	Perubahan kondisi cuaca mempengaruhi kualitas mutu ikan	4	0,11	-4	-0,44
4.	Tingginya harga jual lahan pada daerah pesisir dalam kegiatan budidaya (udang	5	0,14	-3	-0,42



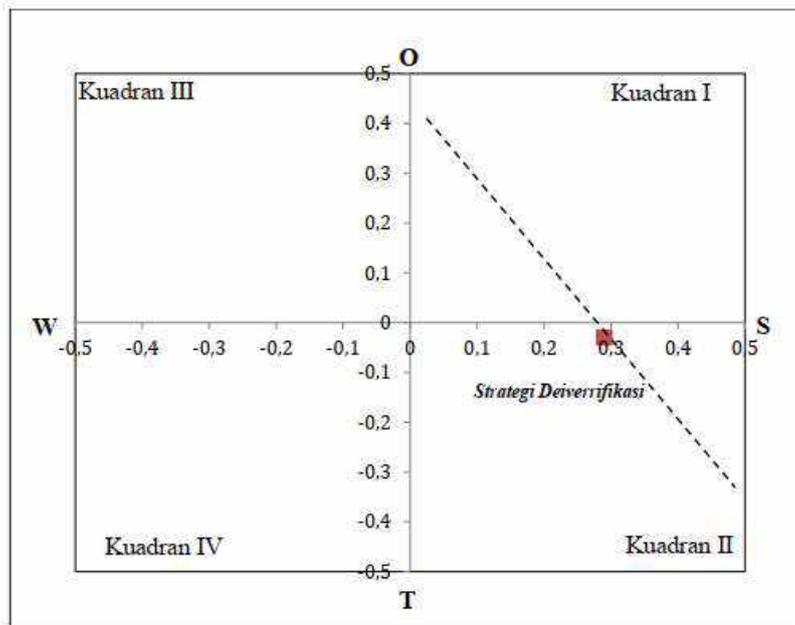
	vaname) karena sebagian kawasan pesisir Kabupaten Belitung masuk dalam RTRW pariwisata			
Total			0.50	-1.61
Total OT (Y)			0.98	-0.03

Tabel 24. Analisis Strategi Perikanan Budidaya

IFAS	<p>Strengths (Kekuatan) Terdapat potensi perikanan budidaya di Kabupaten Belitung terdiri dari budidaya air laut (ikan kerapu, rumput laut dan garam) dan budidaya air tawar (ikan nila, lele, patin, kepiting bakau dan udang vanname). Sudah terbentuknya POKDAKAN yang dibina langsung oleh pemerintah daerah Kabupaten Belitung. Ketersediaan peruntukkan lahan untuk kegiatan perikanan budidaya masih dapat di optimalkan untuk mendukung pengembangan industri perikanan global. Sebagian besar kegiatan usaha budidaya sudah memiliki sendiri dan juga berkelompok yang dibina oleh pemerintah daerah Kabupaten Belitung.</p>	<p>Weakness (Kelemahan) Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya di Kabupaten Belitung. Terbatasnya ketersediaan benih. Minimnya permodalan pelaku usaha budidaya. Masih terbatasnya pengetahuan SDM (pembudidaya dan tenaga ahli) terkait kegiatan budidaya seperti penggunaan teknologi, pembuatan pakan, pembenihan serta pemahaman kualitas air dan penyakit ikan</p>
EFAS	<p>Strategi Agresif (SO) Melakukan sosialisasi dan pemberdayaan terhadap kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) untuk memaksimalkan jumlah hasil produksi dalam memenuhi permintaan pasar sehingga kegiatan budidaya dapat menjadi pekerjaan utama dalam sumber mata pencaharian. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang sudah ditetapkan RZWP3K untuk kegiatan budidaya perikanan darat dan perikanan laut dalam mengembangkan potensi sektor perikanan sebagai salah satu sumber perekonomian di Kabupaten Belitung. Melakukan kerjasama antara pemerintah dan pihak stakeholder dalam mengembangkan potensi usaha kegiatan budidaya garam laut yang menjadi bahan dasar pengawetan ikan asin dan pupuk sehingga dapat meminimalisir biaya operasional dan sebagai salah satu wujud perekonomian baru di Kabupaten Belitung</p>	<p>Strategi Berbenah Diri (WO) Melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan pihak yang memiliki teknologi lebih modern seperti pelatihan sharing ilmu terkait teknologi modern budidaya, pembuatan pakan alternatif, proses pembenihan dan pencegahan terhadap penyakit ikan serta kualitas perairan, Mengupayakan penggantian cold storage guna mengantisipasi perubahan kondisi cuaca yang tak diduga sehingga para pembudidaya dapat mendapatkan pemasukan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, Mengoptimalkan peran pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan pihak swasta atau stakeholder sebagai lembaga penyedia pinjaman modal untuk pelaku pembudidaya sehingga dapat memaksimalkan usaha kegiatan budidaya untuk memenuhi kebutuhan hidup</p>
<p>Threats (Ancaman) Sudah adanya isu sosial dan lingkungan akibat aktivitas penambangan timah di perairan Kabupaten Belitung tepatnya di Kecamatan Sujuk. Tingginya harga pakan buatan (pelet) dan pakan alternatif. Perubahan kondisi cuaca mempengaruhi kualitas mutu ikan.</p>	<p>Strategi Diversifikasi (ST) Perlunya arah kebijakan yang jelas dan pelaksanaan yang tegas dari pemerintah setempat terkait pemanfaatan ruang laut di Kabupaten Belitung khususnya kecamatan Sujuk sehingga dalam pemanfaatannya tidak saling tumpang tindih dan meminimalisir konflik baik ekonomi, lingkungan dan sosial yang berkepanjangan di kehidupan masyarakat, Perlu adanya upaya meminimalisir biaya operasional dengan melakukan kerjasama</p>	<p>Strategi Defensif (WT) Melakukan edukasi terhadap pengetahuan dan pemahaman SDM terkait kegiatan budidaya mulai dari pra, proses dan produksi sehingga dapat meminimalisir biaya operasional dan ketergantungan dari pihak luar, Megoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya dengan teknologi modern untuk dapat memaksimalkan</p>

<p>Tingginya harga jual lahan pada daerah pesisir dalam kegiatan budidaya (udang vaname) karena sebagian kawasan pesisir Kabupaten Belitung masuk dalam RTRW pariwisata</p>	<p>dengan pihak antar OPD, swasta atau stakeholder lain terkait penyediaan bahan baku pakan, pendanaan dan pelatihan edukasi teknis pembuatan pakan. Menyusun strategi untuk peningkatan kegiatan budidaya laut dan payau dengan mengoptimalkan penggunaan lahan terutama lahan peruntukan budidaya</p>	<p>jumlah dan kualitas mutu hasil produksi budidaya maupun pendapatan pembudidaya, Memanfaatkan rogram penyedia lembaga permodalan usaha pe ikanan (LPMUKP, KUR) yang sudah tersedia sebagai modal pengembangan usaha budidaya</p>
---	---	--

Berdasarkan hasil analisis matrik SWOT menunjukkan bahwa prioritas strategi yang tepat terhadap dapat meningkatkan kesejahteraan pembudidaya di Kabupaten Belitung adalah strategi Diversifikasi (ST). Adapun matriks sebagai berikut:



Gambar 7. Analisis Kuadran SWOT Perikanan Budidaya

Prioritas strategi peningkatan tingkat kesejahteraan pembudidaya di Kabupaten Belitung adalah:

- 1) Perlunya arah kebijakan yang jelas dan pelaksanaan yang tegas dari pemerintah setempat terkait pemanfaatan ruang laut di Kabupaten Belitung khususnya kecamatan Sijuk sehingga dalam pemanfaatannya tidak saling tumpang tindih dan meminimalisir konflik baik ekonomi, lingkungan dan sosial yang berkepanjangan di kehidupan masyarakat;
- 2) Perlu adanya upaya meminimalisir biaya operasional dengan melakukan kerjasama dengan pihak antar OPD, swasta atau stakeholder lain terkait penyediaan bahan baku pakan, pendanaan dan pelatihan edukasi teknis pembuatan pakan;
- 3) Menyusun strategi untuk peningkatan kegiatan budidaya laut dan payau dengan mengoptimalkan penggunaan lahan terutama lahan peruntukan budidaya.



B. Kinerja Lainnya Tahun 2023

Pada Tahun 2023 selain melakukan evaluasi indikator kinerja yang tertuang dalam IKU dan Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Belitung juga melakukan perhitungan untuk beberapa indikator yang menjadi parameter tertentu untuk dilaporkan ke Provinsi atau Kementerian.

1. Kinerja Lain

a. Tingkat Konsumsi Ikan Kabupaten Belitung

Tingkat konsumsi ikan atau angka konsumsi ikan merupakan jumlah ikan yang dikonsumsi masyarakat perkapita. Dengan mengkonsumsi ikan maka dapat meningkatkan gizi masyarakat di karena mengandung protein tinggi dan mengandung asam amino esensial yang diperlukan oleh tubuh, disamping itu nilai biologisnya mencapai 90%, dengan jaringan pengikat sedikit sehingga lebih mudah dicerna (kkp.go.id). Selain itu ikan memiliki harganya cukup murah dibandingkan dengan sumber protein lainnya. Berdasarkan Permen KP No.35 tahun 2014 tingkat konsumsi ikan di tentukan penjumlahan konsumsi ikan segar, ikan awetan/ikan asin serta ikan hasil olahan. Konsumsi ikan dalam bentuk olahan tidak bisa ditentukan secara langsung, sehingga perlu dilakukan perhitungan pengeluaran ikan dari kelompok makanan jadi (PIMJ) dan pengeluaran ikan bentuk segar (PIS)

Pada dasarnya perhitungan konsumsi ikan adalah penjumlahan data konsumsi ikan segar dengan konsumsi ikan asin/awetan serta ikan olahan. Namun penjumlahan tersebut tidak bisa langsung dilakukan karena perlu ada konversi untuk menyesuaikan satuannya. Oleh karena itu, metode perhitungan konsumsi sebagai berikut (Permen KP Nomor 35 Tahun 2014):

$$TKI = \sum i n=1KIDS + \sum i n=1KIDA + \sum i n=1KIMJ$$

Keterangan :

TKI = Tingkat Konsumsi Ikan

KIDS = Konsumsi Ikan & Udang Segar

KIDA = Konsumsi Ikan Dan Udang Asing/ Awetan

KIMJ = Konsumsi Ikan yang Dibeli dalam Bentuk Olahan/Matang dalam Kelompok Makanan/Minuman Jadi

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pada Tahun 2023 target nasional pada IKU Kementerian Kelautan Perikanan untuk angka konsumsi ikan meningkat menjadi 60 Kg/kap/thn. **Tahun 2023**, Capaian konsumsi ikan nasional secara resmi sampai sekarang belum di rilis namun diketahui bahwa sampai dengan bulan oktober 2023 tercatat angka capaian konsumsi ikan nasional sudah mencapai 56,48 Kg/kap/thn dan capaian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga belum di rilis, sedangkan tahun 2023 capaian di Kabupaten Belitung adalah 72,2 kg/kap/tahun nilai ini meningkat dibanding tahun 2022 yaitu sebesar 70,60 kg/kap/tahun. Kabupaten Belitung memiliki angka konsumsi ikan yang cukup tinggi apabila dilihat dari rata rata provinsi dan nasional, hal ini dapat menjadi peluang bagi pengembangan sektor perikanan.

Untuk Pelaksanaan **Tahun 2023** Perhitungan Nilai Konsumsi Ikan diperoleh dari Universitas Bangka Belitung (UBB) melalui *Mou* dan Perjanjian Kerjasama (PKS). Dan Hasil perhitungan Tingkat Konsumsi Ikan (TKI) di Kabupaten Belitung Tahun 2023 yaitu sebesar 72,2 kg/kap/tahun. Hasil ini menunjukkan tingkat konsumsi ikan masyarakat di Kabupaten Belitung



sangat tinggi. Tingkat konsumsi ikan di Kab. Belitung telah memenuhi target tingkat konsumsi ikan nasional pada Target IKU Kementerian Kelautan Perikanan yaitu 60 Kg/kap/thn untuk tahun 2023. Tingginya tingkat konsumsi ikan di Kab. Belitung dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Letak geografisnya yang merupakan daerah kepulauan sehingga memiliki ketersediaan stok ikan yang melimpah;
2. Mayoritas masyarakat Kab. Belitung berprofesi nelayan, sehingga tersedia ikan di rumah tangga cukup banyak tanpa mengeluarkan biaya untuk membeli ikan;
3. Harga beberapa jenis ikan tertentu relatif lebih rendah dan mudah di dapat dengan kondisi masih segar; dan
4. Banyaknya sentra kuliner yang menyajikan makanan menu dasar kan terdapat di Kabupaten Belitung.

Jika dilihat dari tahun 2022 kemarin Nilai tingkat konsumsi ikan Kabupaten Belitung menunjukkan angka sebesar 70,6 sedangkan tingkat konsumsi nasional menunjukkan angka 56,48 menunjukkan hasil tingkat konsumsi Provinsi Kabupaten Belitung kategori tinggi dikarenakan memiliki selisih sebesar 14,12 dengan tingkat konsumsi ikan Nasional. Sedangkan tingkat konsumsi ikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 menunjukkan angka 68,5 sedangkan tingkat konsumsi nasional menunjukkan angka 56,48 menunjukkan hasil tingkat konsumsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup tinggi dikarenakan memiliki selisih sebesar 12,02 dengan tingkat konsumsi ikan Nasional. Sehingga baik kabupaten maupun provinsi memiliki nilai yang cukup tinggi dibandingkan nasional. Dan tingkat konsumsi Kabupaten Belitung cukup tinggi juga dikarenakan memiliki selisih sebesar 2,1 dengan tingkat konsumsi ikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Disamping itu Jenis ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat di Kabupaten Belitung cenderung menyukai mengkonsumsi ikan laut . Tingginya konsumsi jenis ikan laut merupakan hal yang wajar dikarenakan Kab. Belitung dikelilingi dan berbatasan langsung dengan laut lepas. Selain itu, mayoritas masyarakat Kab Belitung berprofesi sebagai nelayan, hasil tangkapan ikan juga sering untuk konsumsi sehari-hari. Slogan “Sehari dak makan ikan dak dapat dan dak nyaman juak” hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Belitung, menjadikan ikan sebagai bahan utama dalam konsumsi utama dalam kebutuhan sekunder sehari-hari. Maka, tingginya nilai konsumsi Ikan di Kabupaten Belitung menjadi pendorong peningkatan konsumsi ikan di provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tingkat Konsumsi Ikan di Kab. Belitung pada tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan tingkat konsumsi ikan pada tahun 2022 dan 2021 dimana Tingkat Konsumsi Ikan Tahun 2023 yaitu sebesar 72,2 kg/kap/tahun dan Tingkat Konsumsi Ikan 2022 yaitu sebesar 70,60 kg/kap/tahun. Hasil ini menunjukkan ada peningkatan sebesar 1.6 kg/kap/tahun tingkat konsumsi ikan di Kab. Belitung dari tahun 2022 ke tahun 2023. Peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat di Indonesia setiap tahun merupakan salah satu capaian keberhasilan kementerian kelautan perikanan dalam upaya mengkampanyekan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk makan ikan. Salah satu programnya yaitu Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) yang digagas oleh kementerian KKP



bertujuan untuk bersama-sama membangun kesadaran gizi individu maupun kolektif masyarakat agar gemar mengkonsumsi ikan. Gerakan memasyarakatkan makan ikan (GEMARIKAN) adalah gerakan moral yang memotivasi masyarakat untuk mengkonsumsi ikan secara teratur dalam jumlah yang disyaratkan bagi kesehatan agar terbentuk manusia Indonesia yang sehat, kuat dan cerdas (kkp.go.id). Salah satu kabupaten yang cukup tinggi konsumsi ikan yaitu di Kab. Belitung, sehingga pemerintah daerah perlu mempertahankan dan meningkatkan konsumsi ikan masyarakat dengan cara :

1. Menjaga dan melestarikan sumberdaya perikanan sehingga stok ikan melimpah;
2. Mensosialisasi kepada masyarakat pentingnya konsumsi ikan;
3. Meningkatkan inovasi pengolahan produk perikanan untuk meningkatkan konsumsi ikan dalam bentuk olahan;
4. Menjaga kestabilan harga sumberdaya perikanan; dan
5. Menjaga kesegaran hasil tangkapan nelayan dengan pengadaan cold storage

2. Penghargaan/Apresiasi Instansi Lain

Pada Tahun 2023 Dinas Perikanan Kabupaten Belitung memperoleh satu Penghargaan/ Apresiasi Instansi Lain yaitu dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas Dukungan Kolaborasi pada kegiatan Sensus Pertanian Tahun 2023 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



3. Perbaikan SAKIP pada Tahun 2023

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Oleh Inspektorat nomor 700.1.2.1/195/Rlkin/INSPEK/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 diperoleh Hasil Evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Dinas Perikanan Kabupaten Belitung memperoleh nilai sebesar 73,35 dengan kategori nilai BB yaitu Sangat Baik. Nilai ini mengalami penurunan dari hasil Evaluasi tahun 2021 yaitu sebesar 81,57 dengan kategori nilai A yaitu Memuaskan. Nilai yang diperoleh pada tahun 2022 tidak bisa dibandingkan dengan nilai pada tahun 2021 karena berdasarkan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah terdapat perubahan bobot komponen



dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun 2022 lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja.

Dari hasil evaluasi yang disampaikan masih ada beberapa poin penilaian yang perlu ditingkatkan untuk tahun yang akan datang yang dituangkan melalui rekomendasi. Rekomendasi yang disampaikan kepada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung agar melakukan peningkatan dan perbaikan diantaranya :

- a) Menyusun penjenjangan kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 89 Tahun 2021;
- b) Agar Rencana Aksi dilengkapi dengan anggaran, waktu pelaksanaan serta penanggungjawab pada setiap kegiatan/sub kegiatan;
- c) Membuat SOP tentang Pengumpulan Data Kinerja dan Pengukuran Kinerja;
- d) Melakukan Peningkatan SDM melalui Diklat/Bimtek/Sosialisasi terkait Implementasi AKIP.

Dalam hal tindaklanjut untuk poin a pada dasarnya kami sepakat dengan rekomendasi LHE yang menyatakan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Belitung harus menyusun penjenjangan kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 89 Tahun 2021. Namun demikian diketahui juga bahwa Dinas Perikanan telah menyusun Dokumen Dokumen Penjenjangan Kinerja seperti Dokumen Perjanjian Kinerja dari kepala Dinas sampai pelaksana, Laporan Kinerja eselon 2,3 dan 4, Cascading, Pohon Kinerja dan penjenjangan kinerja lainnya telah sesuai dengan ketentuan dan edaran yang disampaikan sebelumnya. Dikarenakan periode renstra 2018-2023 telah berakhir di tahun ini maka untuk penjenjangan kinerja tahun berikutnya sesuai renstra 2024-2026 yang telah ditetapkan maka kami akan melakukan penyusunan penjenjangan kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 89 Tahun 2021. Selain itu menurut kami perlu dilakukan sosialisasi maupun bimtek khusus mengenai tatacara Menyusun penjenjangan kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 89 Tahun 2021 sehingga penyajian yang disampaikan semua OPD telah memenuhi kesamaan pemahaman terhadap bentuk penjadiannya.

Terkait Rencana Aksi di poin b pada dasarnya kami telah membuat rencana aksi setiap tahunnya sesuai dengan arahan dari bagian organisasi Setda Kabupaten Belitung, terkait pada tabel rencana aksi yang harus dilengkapi anggaran, waktu pelaksanaan serta penanggungjawab pada setiap kegiatan/sub kegiatan telah kami tindaklanjuti pada Perbaikan Rencana Aksi Tahun 2023.

Kemudian poin c terkait SOP tentang Pengumpulan Data Kinerja dan Pengukuran Kinerja pada dasarnya sepakat dengan rekomendasi diatas dan telah kami tindaklanjuti dengan membuat SOP Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja dan SOP Mekanisme Pengukuran Kinerja yang ditetapkan pada bulan desember 2023. Sedangkan untuk poin terakhir pada dasarnya sepakat dengan rekomendasi diatas dan telah kami tindaklanjuti beberapa tahun lalu dengan menugaskan pegawai di bagian perencanaan untuk mengikuti bimtek/sosialisasi terkait AKIP dan tetap akan ditindaklanjuti untuk masa yang akan datang.



C. Akuntabilitas Keuangan

Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 pada umumnya dapat dilaksanakan dengan baik, evaluasi kinerja dari tiap-tiap kegiatan dan sub kegiatan dalam lingkup program yang telah ditetapkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Belitung dapat dilaksanakan sesuai dengan pagu dana yang telah ditetapkan pada penetapan kinerja. Dari segi realisasi keuangannya memang masih ditemukan beberapa kegiatan dengan realisasi keuangan yang masih rendah, namun demikian pelaksanaan kegiatan tersebut masih dapat berlangsung dengan baik terutama untuk beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola. Sedangkan untuk kegiatan yang bersifat menggunakan penyedia memang ada beberapa yang mengalami kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya tetapi telah dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu Pembayarannya pun sesuai dengan kontrak yang berlaku.

Realisasi anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Belitung pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp. 17.106.510.975,00 atau terserap 90,25% dibandingkan dengan anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 16.360.027.025,48 atau terserap 86,51% Rincian per jenis belanja dan per program dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini.

Tabel 25. Tabel Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2023 menurut jenis belanja Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Tahun 2023

		Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
		PENDAPATAN DAERAH			
1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	602.100.000,00	708.194.800,00	117,62
	1	Retribusi Daerah	602.100.000,00	708.194.800,00	117,62
		Jumlah Pendapatan	602.100.000,00	708.194.800,00	117,62
		BELANJA DAERAH			
2		BELANJA OPERASI	18.065.785.031,00	16.306.829.975,00	90,26
	1	Belanja Pegawai	6.526.517.000,00	5.632.449.712,00	86,30
	2	Belanja Barang dan Jasa	5.357.783.031,00	4.861.282.063,00	90,73
	3	Belanja Hibah	6.181.485.000,00	5.813.098.200,00	94,04
3		BELANJA MODAL	889.691.800,00	799.681.000,00	89,88
	1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.691.800,00	48.800.000,00	98,21
	2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	840.000.000,00	750.881.000,00	89,39
	3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-
		Jumlah Belanja	18.955.476.831,00	17.106.510.975,00	90,25



Tabel 26. Tabel Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2023 menurut program/kegiatan/sub kegiatan

NO	JENIS BELANJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2		3	4	5
I	Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18,866,070.00	16,562,850.00	87.79
1.	Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,995,235.00	5,182,200.00	86.44
2.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1,948,800.00	1,754,800.00	90.05
3.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1,490,000.00	1,308,000.00	87.79
4.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	1,946,800.00	1,566,800.00	80.48
5.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	1,490,000.00	1,399,900.00	93.95
6.		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,995,235.00	5,351,150.00	89.26
2	Kegiatan	Administrasi Keuangan	6,528,490,600.00	5,634,243,512.00	86.30
7.	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,526,517,000.00	5,632,449,712.00	86.30
8.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	977,600.00	913,600.00	93.45
9.		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	996,000.00	880,200.00	88.37
3	Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45,500,000.00	40,858,000.00	89.80
10.		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	19,500,000.00	17,820,000.00	91.38
11.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	26,000,000.00	23,038,000.00	88.61
4	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	479,655,193.00	460,566,550.00	96.02
12.	Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14,000,000.00	13,999,000.00	99.99
13.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51,945,000.00	51,943,000.00	100.00
14.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,000,000.00	9,999,500.00	100.00
15.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	128,194,193.00	123,204,850.00	96.11
16.		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	49,990,000.00	45,321,200.00	90.66
17.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,000,000.00	5,730,000.00	63.67
18.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	216,526,000.00	210,369,000.00	97.16
5	Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78,221,800.00	76,605,500.00	97.93
19.	Sub Kegiatan	Pengadaan Mebel	34,271,800.00	33,355,500.00	97.33
20.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43,950,000.00	43,250,000.00	98.41
6	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	298,891,000.00	281,839,855.00	94.30
21.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8,000,000.00	6,227,000.00	77.84
22.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125,000,000.00	109,721,856.00	87.78
23.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	165,891,000.00	165,890,999.00	100.00



7	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	296,479,510.00	257,017,090.00	86.69
24.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	66,000,000.00	56,046,300.00	84.92
25.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42,000,000.00	30,941,100.00	73.67
26.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	27,500,000.00	9,955,000.00	36.20
27.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45,980,000.00	45,640,000.00	99.26
28.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	114,999,510.00	114,434,690.00	99.51
JUMLAH PROGRAM			7,746,104,173.00	6,767,693,357.00	87.37
II	Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
1	Kegiatan	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,361,547,920.00	1,327,875,671.00	97.53
29.	Sub Kegiatan	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	153,707,570.00	153,701,100.00	100.00
30.		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1,168,083,000.00	1,136,035,571.00	97.26
31.		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	39,757,350.00	38,139,000.00	95.93
2	Kegiatan	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	7,419,382,200.00	6,843,665,269.00	92.24
32.	Sub Kegiatan	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	7,419,382,200.00	6,843,665,269.00	92.24
3	Kegiatan	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7,704,500.00	6,807,000.00	88.35
33.	Sub Kegiatan	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	7,704,500.00	6,807,000.00	88.35
JUMLAH PROGRAM			8,788,634,620.00	8,178,347,940.00	93.06
III	Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
1	Kegiatan	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	782,668,130.00	644,303,708.00	82.32
34.	Sub Kegiatan	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	46,774,580.00	46,183,200.00	98.74
35.		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	735,893,550.00	598,120,508.00	81.28
2	Kegiatan	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8,522,050.00	7,582,000.00	88.97
36.	Sub Kegiatan	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah	8,522,050.00	7,582,000.00	88.97



3	Kegiatan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1,060,217,550.00	967,217,400.00	91.23
37.	Sub Kegiatan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	970,838,000.00	879,297,250.00	90.57
38.		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	89,379,550.00	87,920,150.00	98.37
		JUMLAH PROGRAM	1,851,407,730.00	1,619,103,108.00	87.45
IV	PROGRAM	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
1	Kegiatan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	389,404,655.00	364,434,670.00	93.59
39.	Sub Kegiatan	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	389,404,655.00	364,434,670.00	93.59
		JUMLAH PROGRAM	389,404,655.00	364,434,670.00	93.59
IV	PROGRAM	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
1	Kegiatan	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	13,552,500.00	13,190,000.00	97.33
40.	Sub Kegiatan	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	13,552,500.00	13,190,000.00	97.33
2	Kegiatan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	30,755,550.00	30,718,500.00	99.88
41.	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	30,755,550.00	30,718,500.00	99.88
3	Kegiatan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	135,617,603.00	133,023,400.00	98.09
42.	Sub Kegiatan	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	27,190,300.00	26,973,000.00	99.20
43.		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	108,427,303.00	106,050,400.00	97.81
		JUMLAH PROGRAM	179,925,653.00	176,931,900.00	98.34
		JUMLAH TOTAL	18,955,476,831.00	17,106,510,975.00	90.25

Total pagu dana yang dilaksanakan untuk mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 18,955,476,831,- Realisasi pencapaian kinerja penggunaan anggaran Tahun 2023 mengalami peningkatan jumlah anggaran dan persentase realisasi pencapaian di banding Tahun 2022.



Pada Tahun 2022 yang lalu realisasi keuangan sebesar 16.360.027.025,48 atau terserap 86,51% dari pagu dana sebesar 18.911.663.910,- dengan rincian realisasi belanja Operasi mencapai Rp. 14.510.149.287,48 (87,94%) dan belanja modal mencapai Rp. 1.849.877.738,- (76,69 %). Sedangkan pada Tahun 2023 realisasi keuangan mengalami peningkatan nilai realisasi anggaran menjadi sebesar 17.106.510.975 atau terserap 90,25% dari pagu dana sebesar Rp. 18.955.476.831,- dengan rincian realisasi belanja Operasi mencapai Rp. 16.306.829.975,- (90,26%) dan belanja modal mencapai Rp. 799.681.000,- (89,88 %) Hal ini dapat dilihat di gambar berikut :



Gambar 8. Grafik Realisasi Anggaran Dinas Perikanan Tahun 2023.

a. Belanja Operasi

Anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi
- Belanja Pegawai	Rp. 6.526.517.000,-	Rp. 5.632.449.712,-
- Belanja Barang dan Jasa	Rp. 5.357.783.031,-	Rp. 4.861.282.063,-
- Belanja Hibah	Rp. 6.181.485.000,-	Rp. 5.813.098.200,-
Jumlah Belanja Operasi	Rp.18.065.785.031,-	Rp.16.306.829.975,-

Belanja pegawai di Tahun 2023 mencapai 86,30 % yang meliputi gaji pokok PNS dan tunjangan pegawai bulanan, tambahan penghasilan PNS yang merupakan belanja langsung beserta honorarium Non PNS dan honorarium pada kegiatan program penunjang teknis sektor perikanan. Sedangkan Belanja Barang dan jasa di Tahun 2023 mencapai 90,73 % yang meliputi Belanja barang-barang pakai habis, Belanja bahan/material, Belanja Jasa Kantor, Belanja Cetakan dan Penggandaan, Belanja Sewa Rumah/Gedung, Belanja Sewa Sarana Mobilitas, Belanja Makan dan Minuman, Belanja Pakaian Dinas, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Jasa Konsultansi. Pemanfaatan belanja barang yang belum optimal dikarenakan ada di beberapa kegiatan belanja barang yang tidak habis dipergunakan diantaranya. belanja pemeliharaan gedung kantor dibelanjakan sesuai kebutuhan perbaikan



gedung kantor beserta beberapa belanja barang lainnya yang tidak habis dibelanjakan serta sisa tender dari beberapa kegiatan yang merupakan belanja barang namun demikian pelaksanaan kegiatan masih dapat berjalan dengan baik dan optimal. Dan yang terakhir belanja hibah mencapai 94,04 % yang meliputi bantuan kapal motor, bantuan mesin kapal, bantuan alat bantu penangkapan, bantuan alat penangkap ikan, bantuan pakan ikan, bantuan bibit, bantuan sarana budidaya, bantuan sarana dan prasana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

b. Belanja Modal

Anggaran dan realisasi Belanja Modal/Pembangunan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi
- Belanja Peralatan Mesin	Rp. 49.691.800,-	Rp. 48.800.000,-
- Belanja Gedung dan Bangunan	Rp. 840.000.000,-	Rp. 750.881.000,-
- Belanja Modal Aset Tatap lainnya	Rp. 0	Rp. 0
Jumlah Modal	Rp. 889.691.800,-	Rp. 799.681.000,-

Belanja modal dinas pada tahun 2023 dibiayai oleh Dana APBD Kabupaten Belitung dengan belanja modal realisasinya sebesar 89,88%. Pembelanjaan modal tahun 2023 direalisasikan diantaranya pada pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Kolam BBI Membalong, sarana dan prasarana kantor seperti computer, alat pemotong kertas, mebelier dan peralatan bazar ikan. Pada tahun ini umumnya paket pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Namun demikian ada beberapa kegiatan yang mengalami kendala dan permasalahan pekerjaan diantaranya :

- Terdapat penghapusan atau pending beberapa pekerjaan pada beberapa sub kegiatan dikarenakan anggaran yang disediakan pada KUA PPAS tidak memenuhi semua anggaran yang diusulkan renja yang telah di tetapkan. Dalam hal ini skala prioritas usulan kegiatan menjadi solusi yang diambil terhadap keterbatasan anggaran;
- Paket pekerjaan “ Perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan laut berukuran lebih kecil dari 5 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan dan sarana keselamatan pelayaran untuk peningkatan kapasitas nelayan kecil” pada Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Melayan Kecil. Pada pelaksanaan kegiatan ada Keterlambatan Penyerahan hasil pekerjaan dikarenakan kendala teknis oleh pihak ketiga sebanyak 49 hari kalender (sejak tanggal 2 September 2023 sd 20 Oktober 2023). Namun demikian kendala ini sudah diselesaik dan sudah dilakukan serah terima hasil pekerjaan pada tanggal 20 Oktober 2023. dan pihak ketiga sudah membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 90.438.500,-

Berdasarkan pembahasan diatas diperoleh kesimpulan umum mengenai penggunaan anggaran yaitu Dinas Perikanan Kabupaten Belitung untuk tahun 2023 dapat menggunakan anggaran dengan baik ditandai dengan persentase penyerapan anggaran yang cukup tinggi sebesar 90,25 % dan realisasi fisik kegiatan sebesar 100 %. Hal ini membuktikan bahwa dinas dapat melaksanakan kegiatan dengan baik dan melakukan penyerapan penggunaan anggaran dengan baik.

**A. Kesimpulan Kinerja Tahun 2023**

Beberapa hal yang perlu dicatat dan disimpulkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Belitung tahun 2023 antara lain :

- Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Belitung pada dasarnya telah sejalan dengan sasaran serta pencapaian indikator sasaran sebagaimana diuraikan pada Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis 2018-2023. Pencapaian kinerja untuk Indikator yang ditetapkan semuanya tercapai dengan baik;
- Semua kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran dimaksud telah dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Kabupaten Belitung pada tahun 2023 yaitu 112,52, Nilai yang diatas 100 ini menunjukkan jumlah yang diterima nelayan melebihi pengeluaran yang artinya nelayan Belitung ditaraf yang sejahtera. Untuk Hasil Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) di Kabupaten Belitung yaitu 106,02 atau lebih besar 100, sehingga pendapatan hasil budidaya lebih tinggi dibandingkan dengan biaya produksi dan biaya kebutuhan rumah tangga, hal ini juga dapat menyatakan bahwa pembudidaya di Belitung juga sejahtera. Sedangkan untuk nilai Survey Kepuasan Masyarakat diperoleh nilai sebesar 3,905 atau bernilai A yang artinya SANGAT BAIK hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna layanan dinas perikanan kabupaten Belitung dapat terlayani dengan baik dengan hasil yang sangat baik;
- Dalam Pelaksanaannya beberapa yang menjadi faktor pendukung diantaranya 1.Produksi Perikanan Tangkap pada Tahun 2023 mengalami penurunan yaitu dari produksi Tahun 2022 sebesar 43.021,5 ton menjadi 42.220,3 ton pada Tahun 2023. Walaupun menurun namun nilai produksi perikanan tangkap relatif masih tinggi karena kondisi cuaca dan perairan di Tahun 2023 cenderung stabil seperti Tahun 2022 sehingga hasil tangkapan nelayan masih diatas rata rata terkecuali pada triwulan ke empat; 2.Ketersediaan BBM, kebutuhan pokok untuk melaut dan keperluan lainnya yang mudah diperoleh nelayan sehingga operasional melaut dapat terpenuhi dengan baik dan membantu memperlancar proses administrasi ke nelayan untuk memperoleh BBM (solar) bersubsidi; 3. Beberapa kelompok nelayan mendapatkan bantuan dari pemkab Belitung berupa Kapal penangkap ikan, mesin kapal, alat bantu dan alat penangkap ikan untuk memudahkan nelayan dalam menangkap ikan; 4.Penggunaan teknologi penangkapan ikan yang sudah diaplikasikan oleh beberapa nelayan seperti penggunaan GPS dan Fish Finder dalam aktivitas penangkapan ikan; 5. Pembinaan dan penyuluhan yang dilaksanakan rutin kepada nelayan dan kelompok usaha bersama terkait penggunaan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan, serta kesadaran untuk melaporkan hasil produksi perikanan tangkap; 6. Melaksanakan peningkatan produksi budidaya ikan air laut, terutama ikan kerapu, dengan cara menumbuhkan pembudidaya-pembudidaya baru mengingat potensi budidaya ikan kerapu yang sangat besar namun baru termanfaatkan dalam jumlah yang kecil; 7. Melaksanakan pembinaan kepada pembudidaya untuk melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) budidaya yang baku, baik Cara Pembenihan Ikan Yang baik (CPIB) maupun Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB); 8. Memperbanyak komoditas jenis



budidaya yang akan di budidayakan oleh masyarakat. 9. Memberikan bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan bagi pembudidaya ikan air laut maupun air tawar. 10. Meningkatnya keterampilan pembudidaya setelah mendapatkan pembinaan dan pelatihan-pelatihan melalui sekolah lapang yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Belitung.

- Sedangkan untuk harus diminimalisir terhadap penghambat kegiatan diantaranya 1. Kondisi cuaca yang ekstrem pada musim barat harus di minimalisir dengan perencanaan yang baik; 2. Kondisi sarana dan prasarana Perikanan tangkap di beberapa lokasi yang sudah mengalami kerusakan dan perlu segera diperbaiki; 3. Belum maksimalnya penanganan dan pengawasan terhadap aktivitas illegal fishing dan penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. 4. Mayoritas nelayan di Kabupaten Belitung masuk dalam kategori nelayan Kecil; 5. Masih rendahnya kesadaran nelayan dalam kelengkapan administrasi usaha penangkapan; 6. Penurunan produksi lebih kepada zona penangkapan nelayan yang lebih jauh sehingga perlu modernisasi sarpras penangkapan; 7. Menurunnya produksi perikanan budidaya juga disebabkan tidak ada lagi budidaya rumput laut yang juga berkontribusi terhadap pencapaian target produksi perikanan budidaya; 8. Adanya perubahan/peralihan mata pencaharian masyarakat pembudidaya yang sifatnya masih musiman akibat adanya aktivitas penambangan timah yang semakin marak karena harga yang cenderung lebih menjanjikan; 9. Sulitnya mendapatkan pakan alternative serta Kurangnya pengetahuan dalam pembuatan pakan ikan.
- Untuk Kinerja lain Dinas Perikanan Belitung memiliki nilai konsumsi ikan tahun 2023 sebesar 72,2 kg/kap/tahun yang berarti sudah memenuhi target tingkat konsumsi nasional. Dan jauh melampaui nilai Konsumsi ikan Tingkat Propinsi dan Tingkat Nasional.

Sedangkan permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam pelaksanaan kegiatan 2023 antara lain meliputi pembatalan pembuatan RKA pada beberapa sub kegiatan yang disebabkan anggaran APBD pada tahun 2023 yang terbatas serta keterbatasan anggaran APBD provinsi dan APBN juga mempengaruhi pencapaian kinerja sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dan penundaan serta pembatalan beberapa pekerjaan pada saat anggaran perubahan sehingga pencapaian program tertunda pelaksanaannya.

B. Rencana Tindak Lanjut Tahun 2023

Berdasarkan hasil-hasil yang telah diperoleh pada tahun 2023 dengan segala faktor pendukung dan faktor penghambat yang ada didalamnya, pada tahun-tahun selanjutnya Dinas Perikanan harus lebih selektif dan memfokuskan diri pada kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sesuai target pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan dikhususkan pada pelaksanaan yang berdasarkan perubahan renstra yang telah ditetapkan. Selain itu juga tetap memperhatikan saran, masukan dan temuan yang diperoleh di tahun 2023 sehingga pelaksanaannya nanti di tahun 2024 dengan menggunakan renstra yang baru dapat berjalan dan memperoleh pencapaian realisasi kinerja yang lebih baik lagi.

Agar pelaksanaan Renstra dapat berjalan dengan baik, besar harapan kami agar dalam proses penganggaran kegiatan yang telah direncanakan dapat didukung oleh semua pihak termasuk keberpihakan pendanaan sehingga PPAS untuk APBD dapat ditingkatkan.



Lampiran



LAMPIRAN 1 :
TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN

Sasprog/Saskeg		Indikator Kinerja Program (IKP)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) (HASIL KEGIATAN)		Kinerja Program/Kegiatan				Anggaran			SDM		
				Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi(Rp)	%	Target	Realisasi	%
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terlaksananya Fasilitasi dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	1	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100	7.746.104.173	6.767.693.357	87,37	16	16	100
		2	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	%	75	79,86	106,48						
		3	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	%	100	100	100						
		4	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100						
1,1	Terseleenggaranya proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1.1	Terpenuhinya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai peraturan	%	100	100	100	18.866.070	16.562.850	87,79	3	3	100
1,2	Terseleenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.2.1	Terpenuhinya Dokumen Keuangan Sesuai Peraturan	%	100	100	100	6.528.490.600	5.634.243.512	86,30	5	5	100
1,3	Terseleenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.5.1	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	%	75	79,86	106,48	45.500.000	40.858.000	89,80	5	5	100
1,4	Terseleenggaranya Administrari Umum Perangkat Daerah	1.6.1	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	%	100	100	100	479.655.193	460.566.550	96,02	8	8	100
1,5	Terlaksananya Proses Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.7.1	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100	78.221.800	76.605.500	97,93	8	8	100
1,6	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.8.1	Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	298.891.000	281.839.855	94,30	8	8	100
1,7	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.9.1	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100	296.479.510	257.017.090	86,69	8	8	100
<i>Capaian Rata-rata Kegiatan</i>							100,93		91,26				100
2	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton/ Tahun	50.000	42.220,3	84,44	8.788.634.620	8.178.347.940	93,06	8	8	100
2,1	Meningkatnya Fasilitasi , Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	2.1.1	Persentase Penyediaan Fasilitasi, Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	%	4,97	5,52	111,07	1.361.547.920	1.327.875.671,00	97,53	8	8	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2,2	Meningkatnya Pemberdayaan Nelayan Kecil	2.2.1	Persentase Jumlah Nelayan yang mendapatkan Fasilitas Program Perikanan	%	10,76	12,03	111,80	7.419.382.200	6.843.665.269	92,24	8	8	100
2,4	Tercapainya Penerbitan Tanda Daftar dan Rekomendasi Kapal Perikanan	2.4.1	Persentase Verifikasi Dokumen Perizinan Kapal Perikanan	%	22,22	24,67	111,03	7.704.500	6.807.000	88,35	4	4	100
<i>Capaian Rata-rata Kegiatan</i>							111,30			92,71			100
3	Tersedianya sumberdaya perikanan yang berkelanjutan	1	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman	%	8,15	6,88	84,42	389.404.655	364.434.670	93,59	9	9	100
3,1	Terlaksananya Pengawasan dan Pelestarian Sumber Daya Perikanan	3.1.1	Persentase Jumlah Lokasi yang terfasilitasi Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan	%	34,04	34,04	100	389.404.655	364.434.670	93,59	9	9	100
<i>Capaian Rata-rata Kegiatan</i>							100			93,59			100
4	Meningkatnya Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	1	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Ton/ Tahun	8.600	7.464,25	86,79	179.925.653	176.931.900	98,34	7		0
4,1	Meningkatnya Proses Penerbitan Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan Bagi Skala Mikro dan Kecil	4.1.1	Persentase Dokumen Perizinan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	%	8,21	8,21	100	13.552.500	13.190.000	97,33	7		100
4,2	Meningkatnya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran	4.2.1	Persentase Pelaku Usaha yang Menerapkan Standar Keamanan Pangan	%	24,14	26,85	111,23	30.755.550	30.718.500	99,88	7		100
4,3	Terlaksananya Fasillitasi Bagi Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	4.3.1	Persentase Penyediaan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	%	16,67	16,67	100	135.617.603	133.023.400	98,09	7		100
<i>Capaian Rata-rata Kegiatan</i>							103,74			97,71			100
5	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	1	Produksi Perikanan Budidaya	Ton/ Tahun	227	215,45	94,91	1.851.407.730	1.619.103.108	87,45	6	6	100
5,1	Meningkatnya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	5.1.1	Persentase Pembudidaya yang Menguasai Teknik Budidaya	%	49,54	52,32	105,61	782.668.130	644.303.708	82,32	6	6	100
5,2	Tercapainya Proses Penerbitan Izin Usaha Budidaya Ikan	5.2.1	Persentase Verifikasi Dokumen Perizinan Pembudidaya Ikan Kecil	%	19,61	19,61	100	8.522.050	7.582.000	88,97	6	6	100
5,3	Meningkatnya Sarana Prasarana Pengelolaan dan Fasillitasi Pembudidaya Ikan	5.3.1	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Pembudidayaan Ikan	%	18,18	18,18	100,00	1.060.217.550	967.217.400	91,23	6	6	100
<i>Capaian Rata-rata Kegiatan</i>							101,87			87,51			100
Total							103,57	18.955.476.831	17.106.510.975,00	90,25			100

LAMPIRAN II
PERBANDINGAN REALISASI SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN

Sasprog/Saskeg		Indikator Kinerja Program (IKP)/Indikator Kinerja Kegiatan (HASIL KEGIATAN)		Kinerja Program								
				Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Naik/ (Turun)	Capaian 2022	Capaian 2023	Naik/ (Turun)	Target 2023	% Realisasi Terhadap Target 2023
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terlaksananya Fasilitasi dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	1	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan	%	100	100	tetap	100	100	tetap	100	100
		2	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	%	79,44	79,86	Naik	105,92	106,48	Naik	75	106,48
		3	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	%	100	100	tetap	100	100	tetap	100	100
		4	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	tetap	100	100	tetap	100	100
1,1	Terselenggaranya proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1.1	Terpenuhinya dokumen perencanaan penganggaran danevaluasi kinerja sesuai peraturan	%	100	100	tetap	100	100	tetap	100	100
1,2	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.2.1	Terpenuhinya Dokumen Keuangan Sesuai Peraturan	%	100	100	tetap	100	100	tetap	100	100
1,5	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.5.1	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	%	79,44	79,86	Naik	105,92	106,48	Naik	75	106,48
1,6	Terselenggaranya Administrari Umum Perangkat Daerah	1.6.1	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	%	100	100	tetap	100	100	tetap	100	100
1,7	Terlaksananya Proses Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.7.1	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	100	Naik	0	100	Naik	100	100
1,8	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.8.1	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	%	100	100	tetap	100	100	tetap	100	100
1,9	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerenitah Daerah	1.9.1	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	tetap	100	100	tetap	100	100
<i>Capaian Rata-rata Kegiatan</i>								100,99	100,93			
2	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton/ Tahun	43.021,5	42.220,3	Turun	87,80	84,44	turun	50.000	84,44
2,1	Meningkatnya Fasilitasi , Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	2.1.1	Persentase Penyediaan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	%	6,63	5,52	turun	100	111,07	naik	4,97	111,07

1	2	3	4	4	6	7	7	9	10	11		
2,2	Meningkatnya Pemberdayaan Nelayan Kecil	2.2.1	Persentase jumlah nelayan yang mendapatkan fasilitasi program perikanan tangkap	%	6,35	12,03	naik	100	111,8	naik	10,76	111,80
2,3	Tercapainya Penerbitan Tanda Daftar dan Rekomendasi Kapal Perikanan	2.3.1	Persentase Verifikasi Dokumen Perizinan Kapal Perikanan	%	62	24,67	turun	187,88	111,03	turun	22,22	111,03
<i>Capaian Rata-rata Kegiatan</i>								129,29	111,30			
3	Tersedianya sumberdaya perikanan yang berkelanjutan	1	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman	%	7,01	6,88	turun	87,84	84,42	turun	8,15	84,417178
3,1	Terlaksananya Pengawasan dan Pelestarian Sumber Daya Perikanan	3.1.1	Persentase Jumlah Lokasi yang terfasioitasi Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan	%	38,3	34,04	Turun	106	100	turun	34,04	100,00
<i>Capaian Rata-rata Kegiatan</i>								-	106	100	-	
4	Meningkatnya Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	1	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Ton/ Tahun	8.968,07	7.464,25	turun	105,51	86,79	turun	8600	86,79
4,1	Meningkatnya Proses Penerbitan Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan Bagi Skala Mikro dan Kecil	4.1.1	Persentase Dokumen Perizinan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	%	5,97	8,21	naik	100	100	tetap	8,21	100,00
4,2	Meningkatnya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran	4.2.1	Persentase Pelaku Usaha yang Menereapkan Standar Keamanan Pangan	%	32,76	26,85	turun	135,71	111,23	turun	24,14	111,23
4,3	Terlaksananya Fasillitasi Bagi Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	4.3.1	Persentase Penyediaan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	%	25,93	16,67	Turun	175,08	100,00	naik	16,67	100,00
<i>Capaian Rata-rata Kegiatan</i>								136,93	103,74			
5	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	1	Produksi Perikanan Budidaya	Ton/ Tahun	154,59	215,45	naik	69,32	94,91	naik	227	94,91
5,1	Meningkatnya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	5.1.1	Persentase Pembudidaya yang menguasai Teknik Budidaya	%	15,48	52,32	naik	100	105,61	naik	49,54	105,61
5,2	Tercapainya Proses Penerbitan Izin Usaha Budidaya Ikan	5.2.1	Persentase Verifikasi Dokumen Perizinan Pembudidaya Ikan Kecil	%	39	19,61	turun	100	100	tetap	19,61	100,00
5,3	Meningkatnya Sarana Prasarana Pengelolaan dan Fasillitasi Pembudidaya Ikan	5.3.1	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Pembudidayaan Ikan	%	36,36	18,18	Turun	133,33	100,00	naik	18,18	100,00
<i>Capaian Rata-rata Kegiatan</i>								111,11	101,87			
Total								116,86	103,57			

LAMPIRAN III
TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN (IOK)

Sasprog/Saskeg	Rata-rata capaian Sasprog/Saskeg	Sasaran Output Kegiatan (HASIL KEGIATAN)	Output Kegiatan					Anggaran			SDM			Efisiensi Dana		Efisiensi SDM	
			Indikator output Kegiatan (IOK) (KELUARAN KEGIATAN)	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (OH)	Realisasi (OH)	%	Efisien	Tidak Efisien	Efisien	Tidak Efisien
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Terlaksananya Fasilitasi dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100		%	100	100	100										
		106,48		%	75	79,86	106,48										
		100		%	100	100	100										
		100		%	100	100	100										
1,1	Terselenggaranya proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38,46	Terpenuhinya dokumen perencanaan penganggaran danevaluasi kinerja sesuai peraturan	Dokumen	10	10	100	18.866.070	16.562.850	87,79	3	3	100	113,91	-	100	-
1,2	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50,00	Terpenuhinya Dokumen Keuangan Sesuai Peraturan	Dokumen	3	3	100	6.528.490.600	5.634.243.512	86,30	5	5	100	115,87	-	100	-
1,5	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32,00	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Orang	40	40	100	45.500.000	40.858.000	89,80	5	5	100	111,36	-	100	-
1,6	Terselenggaranya Administrari Umum Perangkat Daerah	100	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	%	100	100	100	479.655.193	460.566.550	96,02	8	8	100	104,14	-	100	-
1,7	Terlaksananya Proses Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jenis	9	9	100	78.221.800	76.605.500	97,93	8	8	100	102,11	-	100	-
1,8	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1111	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	%	100	100	100	298.891.000	281.839.855	94,30	8	8	100	106,05	-	100	-
1,9	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jenis	9	9	100	296.479.510	257.017.090	86,69	8	8	100	115,35	-	100	-
<i>Jumlah SK-SP 1</i>							100	7.746.104.173	6.767.693.357	87,37	16	16	100	110,46	-	100,00	-
2	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	84,44		Ton/Tahun	50.000	42.220,3	84,44										
2,1	Meningkatnya Fasilitasi , Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	27,27	Persentase Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Jenis	9	9	100	1.361.547.920	1.327.875.671,00	97,53	8	8	100	102,54	-	100	-
2,2	Meningkatnya Pemberdayaan Nelayan Kecil	59,22	Persentase jumlah nelayan yang mendapatkan fasilitasi program perikanan tangkap	Orang	678	758	111,8	7.419.382.200	6.843.665.269	92,24	8	8	100	121,20	-	111,8	-
2,3	Tercapainya Pendaftaran Rekomendasi Kapal Perikanan	31,71	KelancaranProses Pembuatan Dokumen Kapal	Dokumen	100	111	111	7.704.500	6.807.000	88,35	4	4	100	125,64	-	111,00	-
<i>Jumlah SK-SP 2</i>							107,60	8.788.634.620	8.178.347.940	93,06	8	8	100	116,459	-	107,6	-
3	Tersedianya sumberdaya perikanan yang berkelanjutan	84,42		%	8,15	6,88	84,42										
3,1	Terlaksananya Pengawasan dan Pelestarian Sumber Daya Perikanan	80,00	Presentase Jumlah Lokasi yang terfasilitasi Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Lokasi	16	16	100	389.404.655	364.434.670	93,59	9	9	100	106,85	-	100	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		<i>Jumlah SK-SP 3</i>					100	389.404.655	364.434.670	93,59	9	9	100	106,85	-	100	-	
4	Meningkatnya Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	86,79		Ton/Tahun	8.600	7.464,25	86,79											
4.1	Meningkatnya Proses Penerbitan Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan Bagi Skala Mikro dan Kecil	22,45	Persentase Dokumen Perizinan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Dokumen Verifikasi dan Rekomendasi Penbitan Perizinan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Dokumen	11	11	100	13.552.500	13.190.000	97,33	7	7	100	102,75	-	100	-
4.2	Meningkatnya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran	55,61	Persentase Pelaku Usaha yang Menerapkan Standar Keamanan Pangan	Pelaku Usaha yang Menerapkan Standar Keamanan Pangan	Orang	98	109	111	30.755.550	30.718.500	99,88	7	7	100	111,36	-	111,22	-
4.3	Terlaksananya Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	47,37	Persentase Penyediaan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kelompok	9	9	100	135.617.603	133.023.400	98,09	7	7	100	101,95	-	100	-
		<i>Jumlah SK-SP 4</i>					103,74	179.925.653	176.931.900	98,34	7	7	100	105,35	-	103,74	-	
5	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	94,91		Ton/Tahun	227	215,45	94,91											
5.1	Meningkatnya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	51,13	Persentase Pembudidaya yang menguasai Teknik Budidaya	Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan	Orang	150	159	106	782.668.130	644.303.708	82,32	6	6	100	128,76	-	106	-
5.2	Tercapainya Proses Penerbitan Izin Usaha Budidaya Ikan	71	Persentase Verifikasi Dokumen Perizinan Pembudidaya Ikan Kecil	Verifikasi dan Penerbitan Rekomendasi Dokumen Perizinan Pembudidayaan Ikan Kecil	Dokumen	10	10	100	8.522.050	7.582.000	88,97	6	6	100	112,40	-	100,00	-
5.3	Meningkatnya Sarana Prasarana Pengelolaan dan Fasilitasi Pembudidaya Ikan	20	Persentase ketersediaan Sarana Prasarana Pembudidayaan Ikan	Jumlah Ketersediaan Sarana Prasarana Pembudidayaan Ikan	Jenis	2	2	100	1.060.217.550	967.217.400	91,23	6	6	100	109,62	-	100	-
		<i>Jumlah SK-SP 5</i>					102,00	1.851.407.730	1.619.103.108	87,45	6	6	100	116,93	-	102,00	-	
		Total					102,67	18.955.476.831	17.106.510.975,00	90,25	40	40	100	111,21	-	102,67	-	

LAMPIRA IV
PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN (IOK)

Sasprog/Saskeg		Output Kegiatan							
		Indikator Output	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Naik (Turun)	Capaian 2022	Capaian 2023	Naik (Turun)
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terlaksananya Fasilitasi dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah								
1,1	Terselenggaranya proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	9	10	naik	100	100	tetap
1,2	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	tetap	100	100	tetap
1,5	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang	37	40	naik	100	100	tetap
1,6	Terselenggaranya Administrari Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	tetap	100	100	tetap
1,7	Terlaksananya Proses Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis Barang Milik Daerah	Jenis	0	9	naik	0	100	naik
1,8	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	tetap	100	100	tetap
1,9	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerentah Daerah	Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Jenis	9	9	tetap	100	100	tetap
2	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap								
2,1	Meningkatnya Fasilitasi , Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Fasilitasi, Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Jenis	9	9	tetap	100	100	tetap
2,2	Meningkatnya Pemberdayaan Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan yang Mendapatkan Fasilitasi Program Perikanan Tangkap	Orang	400	758	naik	100	111,8	naik

1		2	3	5	5	6	7	8	9
2,3	Tercapainya Pendaftaran Rekomendasi Kapal Perikanan	Jumlah Verifikasi dan rekomendasi dokumen perizinan kapal perikanan	Dokumen	280	111	turun	186,67	111,00	turun
3	Tersedianya sumberdaya perikanan yang berkelanjutan								
3,1	Terlaksananya Pengawasan dan Pelestarian Sumber Daya Perikanan	Jumlah Lokasi yang terfasilitasi Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Lokasi	18	16	turun	106	100	turun
4	Meningkatnya Produksi Pengolahan Hasil Perikanan								
4,1	Meningkatnya Proses Penerbitan Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan Bagi Skala Mikro dan Kecil	Dokumen Verifikasi dan Rekomendasi Penerbitan Perizinan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Dokumen	8	11	naik	100	100	tetap
4,2	Meningkatnya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran	Pelaku Usaha yang Menerapkan Standar Keamanan Pangan	Orang	133	109	turun	135,71	111,23	turun
4,3	Terlaksananya Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kelompok	14	9	naik	175	100	turun
5	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya								
5,1	Meningkatnya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan	Orang	50	159	naik	100	106	naik
5,2	Tercapainya Proses Penerbitan Izin Usaha Budidaya Ikan	Verifikasi dan Penerbitan Rekomendasi Dokumen Perizinan Pembudidayaan Ikan	Dokumen	7	10	turun	100	10	tetap
5,3	Meningkatnya Sarana Prasarana Pengelolaan dan Fasilitas Pembudidaya Ikan	Jumlah Ketersediaan Sarana Prasarana Pembudidayaan Ikan	Jenis	4	2	turun	133,33	100,00	turun

LAMPIRAN V

**JUMLAH PROGRAM PRIORITAS YANG TERCAPAI SESUAI TARGET PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Unit Kerja	Target Jumlah PP yang mencapai Target	Realisasai PP yang mencapai Target	%
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-

LAMPIRAN VI

JUMLAH KEGIATAN PRIORITAS YANG TERCAPAI SESUAI TARGET PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Unit Kerja	Target Jumlah KP yang mencapai Target	Realisasai KP yang mencapai Target	%
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-

LAMPIRAN VII

**JUMLAH PROYEK PRIORITAS STRATEGIS YANG TERCAPAI SESUAI TARGET PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Unit Kerja	Target Jumlah PPS yang mencapai Target	Realisasai PPSyang mencapai Target	%
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-

LAMPIRAN VIII

**JUMLAH PROYEK STRATEGIS NASIONAL YANG TERCAPAI SESUAI TARGET PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Unit Kerja	Target Jumlah PSN yang mencapai Target	Realisasai PSN yang mencapai Target	%
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FIRDAUS ZAMRI, S.Pi.**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : **H. SAHANI SALEH, S.Sos**

Jabatan : **BUPATI BELITUNG**

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
BUPATI BELITUNG,
H. SAHANI SALEH, S.Sos.



Tanjungpandan, 07 November 2023

Pihak Kesatu,
**KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BELITUNG,**
FIRDAUS ZAMRI, S.Pi.
Pembinu Tk 1
NIP. 19700714-199803 1 005



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya perekonomian rakyat berbasis perikanan yang berkelanjutan	1 Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB Kab. Belitung (%)	19,97
1.1	Meningkatnya kesejahteraan pelaku sektor perikanan berbasis usaha perikanan yang ramah lingkungan	1. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	113
		2. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	106
1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	3,734

Program	Anggaran	Keterangan
A 1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	: Rp. 7,746,104,173	PAPBD
2. Pengelolaan Perikanan Tangkap	: Rp. 3,738,634,620	PAPBD
3. Pengelolaan Perikanan Budidaya	: Rp. 925,569,730	PAPBD
4. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	: Rp. 389,404,655	PAPBD
5. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	: Rp. 179,925,653	PAPBD
Sub Total I	: Rp. 12,979,638,831	
B 1. Pengelolaan Perikanan Tangkap	: Rp. 5,050,000,000	DAK PENUGASAN
2. Pengelolaan Perikanan Budidaya	: Rp. 925,838,000	DAK PENUGASAN
Sub Total II	: Rp. 5,975,838,000	
Total Anggaran	: Rp. 18,955,476,831	

Tanjungpandan, 07 November 2023





Lampiran 10.

**REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2023**

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	FLAFOND ANGGARAN (APBD)		SWAKELOLA (PENYEDIA)	REALISASI			SISA ANGGARAN		LOKASI KEGIATAN
			INDUK (Rp)	PERUBAHAN (Rp)		KEUANGAN (Rp)	KEU (%)	FISIK (%)	RUPIAH	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18,866,070.00	18,866,070.00		16,562,850.00	87.79	100.00			
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,995,235.00	5,995,235.00	Swakelola	5,182,200.00	86.44	100.00	813,035.00	13.56	Tanjungpandan
2	Target: 7,746,104,173	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,948,800.00	1,948,800.00	Swakelola	1,754,800.00	90.05	100.00	194,000.00	9.95	Tanjungpandan
3	Realisas: 6,767,693,357	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,490,000.00	1,490,000.00	Swakelola	1,308,000.00	87.79	100.00	182,000.00	12.21	Tanjungpandan
4		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,946,800.00	1,946,800.00	Swakelola	1,566,800.00	80.48	100.00	380,000.00	19.52	Tanjungpandan
5		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1,490,000.00	1,490,000.00	Swakelola	1,399,900.00	93.95	100.00	90,100.00	6.05	Tanjungpandan
6		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,995,235.00	5,995,235.00	Swakelola	5,351,150.00	89.26	100.00	644,085.00	10.74	Tanjungpandan
		Administrasi Keuangan	6,448,490,600.00	6,528,490,600.00		5,634,243,512.00	86.30	100.00			
7		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,446,517,000.00	6,526,517,000.00	Swakelola	5,632,449,712.00	86.30	100.00	894,067,288.00	13.87	Tanjungpandan
8		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	977,600.00	977,600.00	Swakelola	913,600.00	93.45	100.00	64,000.00	6.55	Tanjungpandan



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	996,000.00	996,000.00	Swakelola	880,200.00	88.37	100.00	115,800.00	11.63	Tanjungpandan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	58,500,000.00	45,500,000.00		40,858,000.00	89.80	100.00			
10		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	19,500,000.00	19,500,000.00	Swakelola	17,820,000.00	91.38	100.00	1,680,000.00	8.62	Tanjungpandan
11		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	39,000,000.00	26,000,000.00	Swakelola	23,038,000.00	88.61	100.00	2,962,000.00	7.59	Luar Daerah dan Tanjungpandan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	438,129,193.00	479,655,193.00		460,566,550.00	96.02	100.00			
12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14,000,000.00	14,000,000.00	Swakelola	13,999,000.00	99.99	100.00	1,000.00	0.01	Tanjungpandan
13		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51,945,000.00	51,945,000.00	Swakelola	51,943,000.00	100.00	100.00	2,000.00	0.00	Tanjungpandan
14		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,000,000.00	10,000,000.00	Swakelola	9,999,500.00	100.00	100.00	500.00	0.01	Tanjungpandan
15		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	128,194,193.00	128,194,193.00	Swakelola	123,204,850.00	96.11	100.00	4,989,343.00	3.89	Tanjungpandan
16		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49,990,000.00	49,990,000.00	Swakelola	45,321,200.00	90.66	100.00	4,668,800.00	9.34	Tanjungpandan
17		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,000,000.00	9,000,000.00	Swakelola	5,730,000.00	63.67	100.00	3,270,000.00	36.33	Tanjungpandan
18		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175,000,000.00	216,526,000.00	Swakelola	210,369,000.00	97.16	100.00	6,157,000.00	3.52	Luar Daerah



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78,221,800.00	78,221,800.00		76,605,500.00	97.93	100.00			
19.		Pengadaan Mebel	34,271,800.00	34,271,800.00	Swakelola	33,355,500.00	97.33	100.00	916,300.00	2.67	Tanjungpandan
20.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43,950,000.00	43,950,000.00	Swakelola	43,250,000.00	98.41	100.00	700,000.00	1.59	Tanjungpandan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	303,691,000.00	298,891,000.00		281,839,855.00	94.30	100.00			
21.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8,000,000.00	8,000,000.00	Swakelola	6,227,000.00	77.84	100.00	1,773,000.00	22.16	Tanjungpandan
22.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	129,800,000.00	125,000,000.00	Swakelola	109,721,856.00	87.78	100.00	15,278,144.00	11.77	Tanjungpandan
23.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	165,891,000.00	165,891,000.00	Swakelola	165,890,999.00	100.00	100.00	1.00	0.00	Tanjungpandan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	296,479,510.00	296,479,510.00		257,017,090.00	86.69	100.00			
24.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	66,000,000.00	66,000,000.00	Swakelola	56,046,300.00	84.92	100.00	9,953,700.00	15.08	Kec. Tanjungpandan, Membalong Sijuk
25.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42,000,000.00	42,000,000.00	Swakelola	30,941,100.00	73.67	100.00	11,058,900.00	26.33	Kec. Tanjungpandan, Membalong Sijuk



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	27,500,000.00	27,500,000.00	Swakelola	9,955,000.00	36.20	100.00	17,545,000.00	63.80	Kec. Tanjungpandan, Membalong Sijuk
27.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45,980,000.00	45,980,000.00	Swakelola	45,640,000.00	99.26	100.00	340,000.00	0.74	Kec. Tanjungpandan, Membalong Sijuk
28.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	114,999,510.00	114,999,510.00	Penyedia	114,434,690.00	99.51	100.00	564,820.00	0.49	Kec. Tanjungpandan, Membalong Sijuk
II	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	1,326,547,920.00	1,361,547,920.00		1,327,875,671.00	97.53	100.00			
29.	Target: 8,788,634,620	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	153,707,570.00	153,707,570.00	Swakelola	153,701,100.00	100.00	100.00	6,470.00	0.00	Kec. Tanjungpandan, Membalong, Selat Nasik, Sijuk, Badau
30.	Realisasi : 8,178,347,940	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1,133,083,000.00	1,168,083,000.00	Swakelola	1,136,035,571.00	97.26	100.00	32,047,429.00	2.83	Kec. Tanjungpandan, Membalong, Selat Nasik, Sijuk, Badau
31.		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	39,757,350.00	39,757,350.00	Swakelola	38,139,000.00	95.93	100.00	1,618,350.00	4.07	Kec. Tanjungpandan, Membalong, Selat Nasik, Sijuk, Badau
		<i>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	5,619,292,100.00	7,419,382,200.00		6,843,665,269.00	92.24	100.00			
32.		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	5,619,292,100.00	7,419,382,200.00	Swakelola	6,843,665,269.00	92.24	100.00	575,716,931.00	10.25	Kec. Membalong dan Sijuk



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	30,532,500.00	7,704,500.00		6,807,000.00	88.35	100.00			
33		Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan dengan Berukuran sampai dengan 10 GT	30,532,500.00	7,704,500.00	Swakelola	6,807,000.00	88.35	100.00	897,500.00	2.94	Kec. Tanjungpandan, Membalong, Selat Nasik, Sijuk, Badau
II	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	767,668,130.00	782,668,130.00		644,303,708.00	82.32	100.00			
34		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	46,774,580.00	46,774,580.00	Swakelola	46,183,200.00	98.74	100.00	591,380.00	1.26	Kec. Membalong, Selat Nasik, Sijuk
35	Target : 1,851,407,730	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	720,893,550.00	735,893,550.00	Swakelola	598,120,508.00	81.28	100.00	137,773,042.00	19.11	Kec. Membalong, Sijuk
	Realisasi : 1,619,103,108	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	14,894,550.00	8,522,050.00		7,582,000.00	88.97	100.00			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3 6 .		Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah	14,894,550.00	8,522,050.00	Swakelola	7,582,000.00	88.97	100.00	940,050.00	6.31	Kec. Tanjungpandan
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1,060,217,550.00	1,060,217,550.00		967,217,400.00	91.23	100.00			
3 7 .		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	970,838,000.00	970,838,000.00	Swakelola	879,297,250.00	90.57	100.00	91,540,750.00	9.43	Kec. Membalong dan Selat Nasik
3 8		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	89,379,550.00	89,379,550.00	Swakelola	87,920,150.00	98.37	100.00	1,459,400.00	1.63	Kec. Selat Nasik, Badau, Sijuk, Membalong
I V	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	392,404,655.00	389,404,655.00		364,434,670.00	93.59	100.00			
3 9 .	Target : 389,404,655	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	392,404,655.00	389,404,655.00	Swakelola	364,434,670.00	93.59	100.00	24,969,985.00	6.36	Kec. Tanjungpandan, Membalong, Selat Nasik, Sijuk, Badau
	Realisasi : 364,434,670										
V	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	13,552,500.00	13,552,500.00		13,190,000.00	97.33	100.00			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.	Target : 179,925,653	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	13,552,500.00	13,552,500.00	Swakelola	13,190,000.00	97.33	100.00	362,500.00	2.67	Kec. Tanjungpandan, Membalong, Selat Nasik, Sijuk, Badau
	Realisasi : 176,931,900	<i>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</i>	30,755,550.00	30,755,550.00		30,718,500.00	99.88	100.00			
41.		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro atau Kecil	30,755,550.00	30,755,550.00	Swakelola	30,718,500.00	99.88	100.00	37,050.00	0.12	Tanjungpandan
		<i>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	135,617,603.00	135,617,603.00		133,023,400.00	98.09	100.00			
42.		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	27,190,300.00	27,190,300.00	Swakelola	26,973,000.00	99.20	100.00	217,300.00	0.80	Tanjungpandan
43.		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	108,427,303.00	108,427,303.00	Swakelola	106,050,400.00	97.81	100.00	2,376,903.00	2.19	Tanjungpandan
			17,033,861,231.00	18,955,476,831.00		17,106,510,975.00	90.25	100.00	1,848,965,856.00	9.75	